

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pada September 2024, perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Kepulauan Riau mencatatkan inflasi sebesar 0,14% (mtm). Secara spasial, Kota Batam dan Kabupaten Karimun juga mengalami inflasi masing-masing sebesar 0,18% (mtm) dan 0,02% (mtm), sedangkan Kota Tanjungpinang mengalami deflasi 0,05% (mtm). Dengan demikian, secara tahunan, IHK di Provinsi Kepri mencatatkan inflasi sebesar 2,53% (yoy) atau secara tahun kalender tercatat sebesar 1,11% (ytd). Adapun komoditas utama penyebab Inflasi Provinsi Kepulauan Riau pada bulan September 2024 terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya delapan indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau naik sebesar 3,46 persen; kelompok pakaian dan alas kaki mengalami kenaikan sebesar 2,51 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga naik sebesar 2,42 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga naik sebesar 0,10 persen; kelompok kesehatan naik sebesar 3,62 persen; kelompok transportasi naik sebesar 3,39 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran naik sebesar 1,51 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya naik sebesar 7,50 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan turun sebesar 0,04 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya turun

sebesar 0,14 persen; serta kelompok pendidikan turun sebesar 1,92 persen.

Dengan perkembangan tersebut pada bulan September 2024, perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Kepulauan Riau mencatat Inflasi sebesar 0,14% (mtm), inflasi terjadi karena kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 106,17 pada Agustus 2024 menjadi 106,32 pada September 2024. Sedangkan tingkat inflasi sebesar 1,11% (ytd).

Pada bulan September 2024, tekanan Inflasi diperkirakan meningkat adapun risiko peningkatan Inflasi yang perlu di waspadai pada Oktober 2024 yakni:

1. Curah hujan yang meningkat dapat berdampak pada terbatasnya pasokan pangan khususnya sayuran;
2. Berlanjutnya kenaikan tekanan harga beras di tengah belum masuknya musim panen;
3. Kenaikan harga emas perhiasan sejalan dengan perkembangan harga komoditas emas secara global.

Adapun beberapa faktor yang dapat menjadi penahan Inflasi antara lain:

1. Penyesuaian harga BBM non-subsidi per 1 Oktober 2024;
2. Membaiknya nilai tukar Rupiah yang mengurangi risiko tekanan *imported inflation*;
3. Ketersediaan pasokan yang masih terjaga khususnya untuk daging dan telur ayam ras.

Kenaikan inflasi triwulan III menunjukkan adanya perkembangan harga berbagai komoditas pada September 2024. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Kepulauan Riau di 3 kabupaten/kota, pada September 2024 terjadi inflasi y-on-y sebesar 2,53 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 103,70 pada September 2023 menjadi 106,32 pada September 2024. Tingkat inflasi m-to-m sebesar 0,14 persen dan tingkat inflasi y-to-d sebesar 1,11 persen.

Tabel 1. IHK dan Tingkat Inflasi *Month to Month* (mtm), *Year to Date* (ytd), dan *Year on Year* (yoy) Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kelompok Pengeluaran (2022=100), September 2024

Kelompok Pengeluaran	IHK September 2023	IHK Desember 2023	IHK September 2024	Tingkat Inflasi m-to-m September 2024 ¹⁾ (%)	Tingkat Inflasi y-to-d September 2024 ²⁾ (%)	Tingkat Inflasi y-on-y September 2024 ³⁾ (%)	Andil Inflasi m-to-m September 2024 (%)	Andil Inflasi y-on-y September 2024 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Umum	103,70	105,15	106,32	0,14	1,11	2,53	0,14	2,53
Makanan, Minuman, dan Tembakau	104,33	107,66	107,94	0,10	0,26	3,46	0,03	1,00
Pakaian dan Alas Kaki	103,63	104,12	106,23	-0	2,03	2,51	-0	0,12
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	102,45	102,51	104,93	0,18	2,36	2,42	0,03	0,39
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	101,69	101,82	101,79	0,08	-0,03	0,10	-0	-0
Kesehatan	100,28	99,88	103,91	-0,01	4,03	3,62	-0	0,09
Transportasi	108,19	110,51	111,86	0,11	1,22	3,39	0,02	0,47
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	100,07	100,07	100,03	-0	-0,04	-0,04	-0	-0
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	101,59	101,69	101,45	-0,06	-0,24	-0,14	-0	-0
Pendidikan	104,15	104,15	102,15	0,85	-1,92	-1,92	0,06	-0,13
Penyediaan Makanan dan Minuman Restoran	100,14	101,59	107,67	0,03	1,27	1,01	-0	0,10
Pengobatan, Obat-obatan, dan Jasa Lainnya	104,68	106,83	112,53	0,07	5,34	7,50	-0	0,45

Tabel 2. Tingkat Inflasi *Month to Month* (mtm), *Year to Date* (ytd), dan *Year on Year* (yoy) Provinsi Kepulauan Riau, September 2024 (Persen)

Inflasi Kepulauan Riau pada triwulan III tahun 2024 upaya pengendalian inflasi masih terus dilakukan terutama melaksanakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dengan strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif).

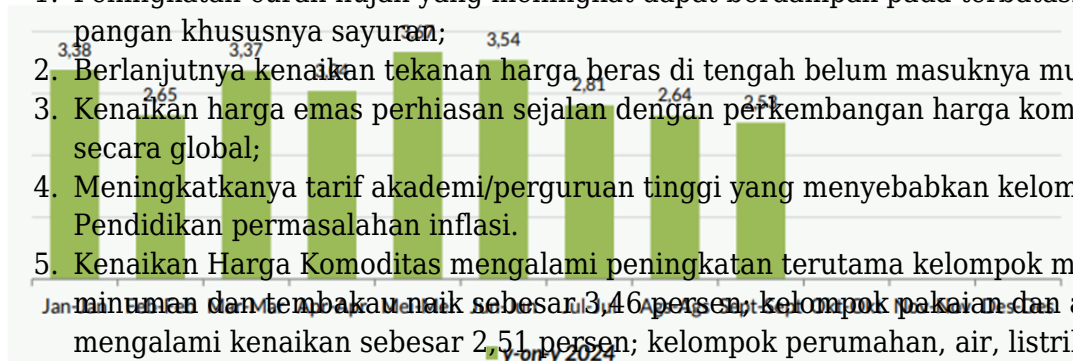
2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Inflasi Provinsi Kepulauan Riau, bulan Juli sampai dengan bulan September 2024 terkendali, pada Juli 2024 Deflasi sebesar -0,45% (mtm), sedangkan inflasi bulan September 2024 sebesar 0,14% (mtm). Sasaran inflasi nasional diperkirakan masih terkendali pada sekitar batas atas kisaran target $2,5 \pm 1\%$.

Tingkat Inflasi		September 2024
Month to Month (m-to-m)	(1)	(3)
Year to Date (y-to-d)		0,14
Year on Year (y-on-y)		1,11
		2,53

Beberapa permasalahan pengendalian inflasi di Provinsi Kepulauan Riau pada Triwulan III Tahun 2024 antara lain:

1. Peningkatan curah hujan yang meningkat dapat berdampak pada terbatasnya pasokan pangan khususnya sayuran;
2. Berlanjutnya kenaikan tekanan harga beras di tengah belum masuknya musim panen;
3. Kenaikan harga emas perhiasan sejalan dengan perkembangan harga komoditas emas secara global;
4. Meningkatnya tarif akademi/perguruan tinggi yang menyebabkan kelompok Pendidikan permasalahan inflasi.
5. Kenaikan Harga Komoditas mengalami peningkatan terutama kelompok makanan, minuman dan tembakau naik sebesar 3,46 persen; kelompok pakaian dan alas kaki mengalami kenaikan sebesar 2,51 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga naik sebesar 2,42 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga naik sebesar 0,10 persen; kelompok kesehatan naik sebesar 3,62 persen; kelompok transportasi naik sebesar 3,39 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran naik sebesar 1,51 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya naik sebesar 7,50 persen.



3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan III tahun 2024. Beberapa kegiatan di triwulan III ini terkait pengendalian inflasi sebagai berikut:

1. Pemerintah Kepulauan Riau secara konsisten bersinergi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik di level provinsi maupun kabupaten/kota se- Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dengan strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif).
 2. Koordinasi dan sinergi program melalui rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Tanjungpinang dan Kota Batam serta *High Level Meeting* (HLM) TPID Provinsi Kepulauan Riau.
 3. Sosialisasi *dashboard* pengendalian inflasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Tanjungpinang.
 4. Sinergi penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah (GPM) pada momen peringatan HUT Provinsi Kepulauan Riau.
 5. Penyaluran 1 (satu) unit Kedai Pangan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Karimun kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Karimun.
 6. Melanjutkan panen Gerakan Sekolah Menanam (GSM) secara mandiri oleh setiap sekolah peserta Gerakan Sekolah Menanam (GSM) 2024.
 7. Fasilitasi korporatisasi pembentukan Asosiasi Petani Cabai Kabupaten Bintan bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan.
 8. Pembuatan demplot cabai merah dengan *greenhouse* di Kota Batam, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Natuna.
4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Beberapa evaluasi terkait kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu :

1. Curah hujan yang meningkat dapat berdampak pada terbatasnya pasokan pangan khususnya sayuran.
 2. Berlanjutnya kenaikan tekanan harga beras di tengah belum masuknya musim panen.
 3. Kenaikan harga emas perhiasan sejalan dengan perkembangan harga komoditas emas secara global.
 4. Penyesuaian harga BBM non-subsidi per 1 Oktober 2024.
 5. Membaiknya nilai tukar Rupiah yang mengurangi risiko tekanan *imported inflation*.
 6. Ketersediaan pasokan yang masih terjaga khususnya untuk daging dan telur ayam ras.
5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi Kepulauan Riau maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau merekomendasikan beberapa kebijakan pengendalian inflasi kepada Pemerintah Pusat sebagai berikut:

1. Sinergi penyelenggaraan Operasi Pasar Murah (OPM) dan Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau.
2. Koordinasi dan sinergi program melalui Rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di wilayah Kepulauan Riau, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dan *Focus Group Discussion* (FGD) terkait dengan optimalisasi bantuan pangan serta pengaruh bantuan pangan terhadap pengendalian Inflasi di Provinsi Kepulauan Riau.

Kenaikan permintaan terhadap komoditas pangan secara umum serta kondisi cuaca

3.

dengan hujan intensitas hujan menengah-tinggi yang dapat memengaruhi produksi komoditas pangan utama.

4. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Kepulauan Riau berlanjutnya Periode tahun ajaran baru berpotensi meningkatnya tarif akademi/ perguruan tinggi.
5. Tim Pengendalian Inflasi Daerah akan terus mendorong peningkatan produksi pangan lokal terutama beras, mengoptimalkan Kerja sama Antar Daerah yang sudah ada serta penajakan potensi Kerjasama Antar Daerah baru, melaksanakan pembangunan *smart greenhouse*.
6. Tim Pengendalian Inflasi Daerah akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan distribusi pasokan terjaga dengan aman agar stok pangan tersedia dalam jumlah yang cukup.